



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan

Konstruksi Fisik Renovasi ACP Pada Gedung Grha Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Nomor : 169.1/SPK/PPK/SET.BIII-4/IX/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 178.2/UKPBJ-POKJA.1/IX/2022 tanggal 07 September 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 168.1/SPPBJ/PPK/SET.BIII-4/IX/2022 tanggal 07 September 2022,

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : PPK pada Biro Keuangan dan Rumah Tanggapada
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Berkedudukan di : Kemenpora RI, Jalan Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta
Pusat 10270

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Perbendaharaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 03 Desember 2018
Notaris : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;